



**PT. ECOTROPICA**



**LAPORAN**

**DESKRIPTIF MASYARAKAT PESISIR ACEH**

**STUDI PEMETAAN**

**BIDANG**

**PENGEMBANGAN EKONOMI – EKOLOGI MASYARAKAT  
(*COMMUNITY EKONOMI DAN EKOLOGI DEVELOPMENT*)**

**KAMARUDDIN**

**KETUA PENELITI**

**KABUPATEN PIDIE, KAB. PIDIE JAYA, KAB. BIREUN DAN KOTA  
SABANG**

**BIDANG EKONOMI – EKOLOGI**

**4 – 15 JUNI 2012**

1

-----  
kamaruddin.unimal@gmail.com/081395029273

## PROLOG

Propinsi Aceh adalah salah satu propinsi di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak di dunia. Perhatian ini muncul berkenaan dengan banyak hal, mulai persoalan konflik bersenjata dan dampaknya, bencana alam, serta kondisi pengelolaan sumberdaya alamnya. Khusus mengenai hal yang terakhir, persoalan pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan ekonomi dan ekologi Aceh menjadi isu hangat yang oleh sebagian pihak diduga sebagai dasar kelahiran konflik bersenjata di tahun 1970-an.

Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Blok. Andaman III yang sudah mulai dilirik oleh investor. Pertambangan ladang minyak bumi dan gas alam tersebut juga menuntut perlunya sebuah pendekatan baru dalam pengelolaannya, utamanya yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk yang ada di sekitar ladang minyak dan gas tersebut. Ini menjadi sangat penting sebab ekseptasi dan apresiasi penduduk atas pengelolaan kawasan tersebut akan berhubungan erat dengan upaya mendukung tetap beroperasinya beberapa industri besar di Aceh.

Berkenaan dengan kenyataan tersebut, pengenalan terhadap karakteristik (*Community Economi Development*) di sekitar kawasan beroperasinya perusahaan tersebut akan sangat berguna oleh pengelola baru untuk menjamin kelancaran produknya di kemudian hari.

Dalam survey ini, Parameter Bidang Ekonomi-Ekologi yang akan dilihat adalah; Pola Matapencaharian (perikanan, daerah penangkapan ikan, teknologi, dll), Tingkat Ketergantungan pada sumberdaya yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka (kegiatan berbasis perikanan), Akses terhadap modal ekonomi dan distribusi (termasuk pemasaran perikanan lokal dan perdagangan), Nilai ekonomi kegiatan perikanan bagi masyarakat, Infrastruktur Ekonomi Lokal, Angka Angkatan Kerja Lokal, Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan Desa (Village level)

Sumber data Primer dan Sekunder akan di analisis dengan Metode Deskriptif, Kualitatif dan kuantitatif, Bentuk Kegiatan: Proses pengenalan terhadap karakteristik masyarakat Aceh secara umum serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan Aceh Pidie, Kabupaten Pijay, Kabupaten Bireun dan Kota Sabang dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya melalui pengamatan/observasi, diskusi intensif (FGD, wawancara) dan melalui studi dokumen.

Dengan tujuan, antara lain: Mengidentifikasi struktur social-ekonomi dan ekologi masyarakat pesisir, mengidentifikasi kerentanan masyarakat pesisir di wilayah survey dalam konteks kehidupan masyarakat setempat dan ekonomi rumah tangga, memetakan stakeholder kunci dan peran mereka dalam dinamika

sosial-ekonomi dan ekologi dan menyusun dan menetapkan rekomendasi untuk program masyarakat pesisir lokal dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hasil atau Output Studi yang diharapkan: Struktur ekonomi – ekologi dan pemetaannya, Pemetaan pelaku dalam konteks pengembangan struktur masyarakat, Pola interaksi social, ekonomi dan potensi konflik di masyarakat, Peran kelompok masyarakat dan gender dalam kelompok-kelompok sosial, Diskripsi peran dan partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan, Peta Permasalahan: Lingkungan, Infrastruktur, Kelembagaan, Bisnis, Mata Pencaharian, Air dan Sanitasi, Pasar, ekonomi, dan ekologi dan pedoman dan referensi untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat khususnya Program CSR kedepan.

Waktu dan Metode Pengumpulan Data, sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa proses kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal yang diharapkan akan bisa memberi tambahan pengetahuan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat di Kabupaten Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun dan Kota Sabang. Proses pengumpulan data dilakukan 4-15 Juni 2012.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: *Observasi*, proses pengamatan yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat di Aceh Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Sabang. Pada awalnya hanya difokuskan pada beberapa kecamatan dan desa Pesisir yang dianggap memiliki kedekatan dengan Andaman III. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya pengamatan dilakukan berkembang pada desa-desa atau bahkan kecamatan yang pada mulanya dianggap tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak/gas yang akan dilakukan. Kalau pada mulanya pengamatan hanya dilakukan di kecamatan dan Desa Pesisir, pada kenyataannya dilapangan juga di observasi kecamatan dan desa yang bukan katagori pesisir atau pedalaman dan Kota.

Pemilihan Kabupaten Pidie, Pijay, Bireun dan Sabang ini untuk diamati sebagian besar lebih didasarkan pada peta yang kami peroleh dari Tim Sosial Mapping yang kemudian kami bandingkan dengan kondisi terkini di lapangan. Hal yang diamati, selain berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi dan ekologi, juga meliputi kondisi dan pola pemukiman dan hal-hal lainnya yang dianggap relevan untuk membantu menjelaskan kondisi sosial ekonomi dan ekologi masyarakat.

*Wawancara*, proses yang dilakukan secara Individu dan tim secara umum bersifat wawancara bebas dan intensif. Wawancara bebas diartikan sebagai sebuah kegiatan wawancara untuk menggali data tanpa harus dirancang terlebih dahulu kondisi dan pada siapa wawancara dilakukan. Namun demikian penajaman materi wawancara juga dilakukan tim, dengan melakukan wawancara intensif terutama dengan person yang memiliki informasi mendalam tentang objek

penelitian ini. Untuk wawancara intensif dilakukan oleh tim utama, sedangkan wawancara tim juga dibantu dengan enumerator (tim penggali data tambahan). Selama di lapangan, masyarakat yang berhasil diwawancarai memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam sehingga sedikit banyak bisa menggambarkan diferensiasi persepsi dan tanggapan tentang kondisi rill ekonomi dan ekologi.

*Focus Group Discussion (FGD)*, rangkaian FGD dilakukan dengan harapan selain tergal data yang beragam dari banyak orang juga akan secara otomatis terjadi *cross check* data. Sampai dengan proses penggalian data selesai dilakukan telah berhasil dilakukan FGD. FGD dilakukan dengan Unsur PEMDA, Kelompok kepentingan, Panglima Laot, KPA-KMPA, Tokoh Masyarakat, Geuchik, Umum Mukim, dan lain-lain.

Serta studi dokumen, studi ini dilakukan hanya sebatas pada dokumen yang memuat data sekunder seperti laporan berkala Badan Pusat Statistik, sebagian artikel koran serta beberapa buku yang memuat tentang sosial ekonomi dan ekologi di Kabupaten Pidie, Pijay, Bireun dan Sabang.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Aceh, terutama dalam peningkatan ekonomi dan ekologi Aceh. Masyarakat Aceh mesti dilihat sebagai suatu identitas sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum sudah lama terbentuk sejak awal abad ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah.

Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk **Masyarakat Ideal Maritim** yang tentunya amat berbeda dari ideal tipe masyarakat Agraris. Apalagi Aceh terkenal sebagai wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala upaya yang ingin mendominasi (apalagi "menjajah"). Kahin 1990, Aceh termasuk senditif terhadap orang-orang luar yang berkeinginan untuk menguasai Aceh. Orientasi ke-Aceh-an ini terkait dengan identitas Aceh, komitmen kepada Islam yang kuat, bahasa dan adat istiadat serta harga diri orang Aceh yang merupakan unsur-unsur yang melandasi identitas ke-Aceh-an.<sup>1</sup> Masyarakat Aceh berjuang demi identitasnya, menentang ketidakadilan, merasa dipinggirkan dan dizalimi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anthony Reid, Ed., *Verendah of Violence The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 12. Dan Hasil FGD dengan pihak KPA/PA dan KMPA Pidie tgl 6-7 Juni 2012.

<sup>2</sup> Beberapa buku untuk menggambarkan hal ini masih layak dibaca diantaranya ditulis oleh Anthoni Reid, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh (Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abat ke-19)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Harley (editor), 2008, *Mukim Dari Masa ke Masa*, JKMA, Banda Aceh. Isa Sulaiman, 2006, *Mosaik Konflik di Aceh*, AcehKita dan ACSTF, Jakarta & *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-kuasar, Jakarta. M Nuer El Ibrahimy, 1982, *Teungku Muhammad Daud Beureueh, Perannya dalam Pergolakan di Aceh*, Gunung Agung, Jakarta. Otto Syamsuddin, 2001, *Dari*

Kemajuan industri, setelah penemuan cadangan gas bumi besar di Aceh Utara pada tahun 1971, ditandai dengan migrasi pekerja dari luar Aceh dalam jumlah yang cukup besar ke wilayah ini dan dirasakan oleh banyak penduduk lokal sebagai mengganggu dan eksploitatif. Pada era 1970-an, hanya sejumlah kecil proporsi pendapatan dari Zona Industri Lhokseumawe kembali kepada pemerintah Aceh. Selain itu, tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, hegemonik, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi Gempa Bumi 8,9 Skala Richter disusul gelombang Tsunami melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya, yang telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan ekologi Aceh, laporan Bappeda Aceh, 2009, *Sebelum Tsunami*: Jumlah Penduduk: 4.297.485 Jiwa, angkatan Kerja: 2.538.189 Jiwa, tingkat Pengangguran : 11,2% (dari Jumlah Penduduk), tingkat Pertumbuhan Ekonomi: 3,5% per Tahun, struktur perekonomian didominasi oleh sektor pertanian dan jumlah penduduk miskin 1,7 juta jiwa atau 40,39 Persen. *PascaTsunami*: Jumlah Penduduk 4.076.760 Jiwa, pertumbuhan ekonomi turun 0,25 % pada tahun 2005, tingkat pengangguran 11,2 %, pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 % dan persentase penduduk miskin 28,8 %.<sup>3</sup>

Proses perdamaian yang ditandai dengan lahirnya MoU Helsinki tahun 2005 telah mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik dan ekonomi paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia. Laga senjata berubah menjadi adu argument, hutan belantara, berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi, diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan.<sup>4</sup>

MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga membuka peluang besar bagi Aceh dalam segala hal, terutama ekonomi Aceh. Peluang tersebut mesti sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar MoU dan UUPA.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip dasar perekonomian<sup>6</sup> Aceh diatur dalam MoU dan UUPA.

---

*Maaf Ke Panik Aceh (Sebuah Sketsa Sosiologi Politik)*, LSPP, Jakarta. Taufan Damanik, 2010, *Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalisme*, FES dan AFI, Jakarta.

<sup>3</sup> Sumber laporkan Bappeda Aceh, 2009.

<sup>4</sup> Kamaruddin Hasan, Pilkada, Partai Lokal Dan Masa Depan Aceh, Harapan Berakhirnya Transisi (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>5</sup> Hasil FGD dengan pihak KPA/PA dan KMPA wilayah Pidie, tanggal 5-6 Juni 2012.

SBY-JK tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam MoU. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY-JK melakukan lima babak komunikasi politik formal maupun informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koenigstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki.<sup>7</sup> Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru<sup>8</sup> dalam penyelesaian pemberontakan GAM, yang

---

<sup>6</sup> Prinsip-prinsip dasar dalam MoU Helsinki, Prinsip yang pertama dan mungkin yang paling fundamental dari MoU (Pasal 1.1.2a) menyatakan 'Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.' Prinsip kedua MoU (Pasal 1.1.2b) menyatakan bahwa 'Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh,' prinsip ketiga (Pasal 1.1.2c) menyebutkan bahwa, 'Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh dan prinsip keempat MoU (Pasal 1.1.2d), menyatakan bahwa 'Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Prinsip-prinsip dasar Perekonomian di Aceh, mengacu pada UUPA Bab.XXII, antara lain disebutkan dalam **Pasal 154**, (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh. (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja. Dalam **pasal 155**, (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

<sup>7</sup> Moch.Nuhasim, *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008), h. 108

<sup>8</sup> Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001). Sementara untuk

mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi politik informal dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Mengingat tensi politik dan ekonomi di wilayah bekas konflik dan tsunami yang menghancurkan ekonomi dan ekologi masyarakat Aceh., biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang bertarung. Untuk itu perlu dipahami, momentum-momentum yang dapat membawa masa depan Aceh kearah yang lebih baik, antaranya:<sup>9</sup>

*Momentum* damai Aceh, bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada ancaman dan teror. *Momentum* selanjutnya Pilkada, bahwa cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika pilkada yang berlangsung 11 Desember 2006 paling demokratis telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh.

*Momentum* yang tak kalau penting adalah adalah Pilpres 9 Juli 2009 yang lalu, terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Boediono sebagai Wakil Presiden dan telah berhasil menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan pilihan rakyat hampir 90% jadi kepada pasangan ini. Angka yang mengejutkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini menang mutlak di Aceh. *Momentum* Pemilukada 2012, yang sempat diwarnai berbagai konflik. Namun hal ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Pemilukada 2012 dapat berjalan dengan baik.

Dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf). Pesaing Utama adalah Drh. Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan. Angka yang mengejutkan bahwa pasangan Zaini dan Mualim ini menang diatas 50%. Sehingga hal ini menjadi momentum tersendiri dalam proses percepatan pembangunan Aceh ke depan. Pasangan ini diharapkan dapat membawa Aceh lebih maju dan bermartabat. Pemimpin yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas. Rakyat Aceh, membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, dan hak-hak sosial, budaya dan politik, ruang public menjadi penting diperjuangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, geliat perubahan kondisi Ekonomi, politik dan keamanan, geliat sektor ekonomi juga mulai menjadi menarik dikaji. Keberadaan beberapa industri besar di Aceh tanpa ditangani dengan baik akan menimbulkan dan mengalami permasalahan dalam proses produksi juga menjadi perhatian juga

---

penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

<sup>9</sup> Kamaruddin Hasan dan Nuhasim, Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008).

ramai dibicarakan. Sulitnya mendapatkan gas bumi sebagai bahan baku mempertahankan operasional beberapa perusahaan yang sudah ada oleh sebagian kalangan dianggap sesuatu yang tidak masuk akal. Ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa di Aceh juga terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi minyak bumi dan gas alam dalam skala yang besar. Namun apa lacur, keberadaan perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas alam ternyata tidak serta merta berdampak bagi kesejahteraan ekonomi rakyat Aceh.

=====